

Strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam Perspektif Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Kebumen

Putri Banowati ^{a,1}, Suharno ^{b,2}

¹ putribanowati.2020@student.uny.ac.id Mahasiswa Departemen PKnH, Fishipol, UNY

² suharno@uny.ac.id Dosen Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Politik, UNY

^a Mahasiswa (Departemen Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FISHIPOL UNY), Yogyakarta Indonesia

^b Dosen (Departemen Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FISHIPOL UNY), Yogyakarta Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan ; 1) upaya Bappeda dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kebumen dalam perspektif kebijakan; 2) kendala-kendala yang dihadapi Bappeda dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kebumen dalam perspektif kebijakan. Penelitian ini ialah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tempat penelitian di kantor Bappeda. Penentuan subjek penelitian ditentukan secara *purposive*. Adapun subjek penelitian ini berjumlah (2) orang yaitu, SubKoor Bidang Pemerintahan dan pembangunan Manusia, dan salah satu masyarakat di lingkungan Kabupaten Kebumen. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan *cross check* Selanjutnya analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Upaya Bappeda dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kebumen, 2) Kendala yang dihadapi oleh Bappeda dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kebumen yaitu a) Data antara Pemerintah Pusat dengan kenyataan di lapangan tidak sesuai b) Program yang tidak tepat sasaran.

ABSTRACT

This research aims to describe; 1) Bappeda's efforts to eradicate poverty in Kebumen Regency; 2) the obstacles faced by Bappeda in alleviating poverty in Kebumen Regency. This research is descriptive research with a qualitative approach. The research location is at the Bappeda office. The determination of research subjects was determined purposively. The subjects of this research were (2) people, namely, the Sub-Coordinator for Government and Human Development, and one of the people in the Kebumen Regency environment. Data collection was carried out using interview and documentation techniques. The data validity checking technique is carried out using a cross check. Next, data analysis is carried out through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this research show: 1) Bappeda's efforts in alleviating poverty in Kebumen Regency, 2) The obstacles faced by Bappeda in alleviating poverty in Kebumen Regency, namely a) Data between the Central Government and reality in the field does not match b) Programs that are not on target.

Sejarah Artikel

Diterima : 21 Juni 2024

Disetujui: 21 Juni 2024

Kata kunci:

Bappeda, Pengentasan Kemiskinan, Upaya

Keywords:

Bappeda, Efforts, Poverty alleviation

Pendahuluan

Indonesia termasuk dalam negara dengan penduduk yang banyak secara global sehingga terdapat permasalahan yang ada. Satu dari sekian banyak problematik yang dihadapi Indonesia yakni mengarah pada kondisi kemiskinan yang hal ini terkait pula dengan problematik pokok di seluruh kawasan negara dunia, termasuk yang kategorisasinya negara masih taraf berkembang. Pengentasan kemiskinan merupakan topik yang mendapat perhatian khusus dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), karena kemiskinan merupakan isu yang memiliki banyak aspek. Pada bulan Maret 2023 persentase penduduk miskin di Indonesia mencapai 9,36% dan mengalami penurunan

sebesar 0,21 di bulan September 2022 sementara kondisi penurunan ini diketahui sudah teridentifikasi sejak Maret 2022 dengan angka 0,18.

Indonesia mempunyai cakupan wilayah yang terbilang sangat luas dengan pembagiannya menjadi 3 bagian area: timur, tengah, dan barat, ditemui berbagai tantangan, termasuk masalah kemiskinan. Data BPS menyampaikan jika saat ini Papua merupakan provinsi terdepan dalam hal tingkat kemiskinan, dengan persentase mencapai 26,03%. Di wilayah tengah, seperti NTT dan NTB, angka kemiskinan masing-masingnya 19,96% dan 13,85%. Sementara itu, di wilayah barat, Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi, mencapai 11,49%, diikuti oleh Jawa Tengah dengan persentase 10,98%. Menurut data BPS menegaskan jika Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah mempunyai angka kemiskinan dari yang tertinggi hingga terendah. Data tersebut menegaskan jika Kabupaten Kebumen menjadi kabupaten yang menduduki angka kemiskinan tertinggi ke-5 setelah Kabupaten Cilacap, banyumas, Purbalingga, dan Banjarnegara. Garis kemiskinan Kabupaten Kebumen dari tahun 2020-2023.

Berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2020 didominasi oleh lulusan Sd sebanyak 306.057 orang, diikuti oleh lulusan SMA sebanyak 168.522 orang. Dilihat dari perkembangan dari tahun ke tahun, struktur pendidikan tertinggi ditamatkan penduduk Kabupaten Kebumen cenderung stagnan didominasi lulusan pendidikan dasar. Sedangkan, persebaran penduduk antar kecamatan tidak merata. Kecamatan Kebumen memiliki jumlah penduduk terbesar 134.132 jiwa pada tahun 2020. Kebumen sebagai pusat pemerintahan, pusat ekonomi dan wilayah perkotaan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk tinggal di Kecamatan Kebumen. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa kemiskinan yang ada di Kabupaten Kebumen termasuk dalam kemiskinan kultural dan struktural. Hal tersebut dibuktikan bahwa kemiskinan kultural, penduduk di Kabupaten Kebumen memiliki tingkat pendidikan yang masih rendah sehingga mengacu pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Sedangkan dalam kemiskinan struktural, pemerintah Kabupaten Kebumen sudah mempunyai upaya, akan tetapi dalam melaksanakan upaya tersebut belum ada yang 100 % berhasil dan belum dapat mengurangi kemiskinan di Kabupaten Kebumen.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam perspektif kebijakan yang dilakukan melalui berbagai program. Berdasarkan Perda Kebumen No 2 Tahun 2022 terkait perubahan atas Perda Kebumen No 20 Tahun 2012 yang membahas perihal akselerasi penanggulangan kemiskinan dalam pasal 12 ayat (2) secara lugas menerangkan jika program tersebut merujuk pada aspek penanggulangan yang diperuntukkan bagi kondisi kemiskinan sejalan dengan penyebutan ayat (1) di mana cakupannya meliputi: (a) pemberian program bantuan sosial sekaligus jaringan untuk menjamin aspek sosial secara terpadu dan didasarkan pada unit rumah tangga, ataupun keluarga, hingga individu tertentu, dengan tujuan spesifik yakni pemenuhan sejumlah hak secara mendasar, selanjutnya memberikan keringanan dari segi beban kehidupan dan meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat yang masih terkategori miskin, b. Selanjutnya mengenai program pemberdayaan komunitas maupun penguatan bagi pelaku UMKM yang mana tujuan secara general memberikan penguatan atas kapasitas komunitas masyarakat yang masih terabilisasi dengan kondisi miskin supaya dapat berpartisipasi sekaligus merasakan kebermanfaatannya atas proses pembangunan secara menyeluruh, serta c. Program lain yang dapat memberikan dorongan mengenai aktivitas perekonomian serta yang mengarah pada konteks kesejahteraan masyarakat yang masih tergolong miskin baik itu yang sifatnya langsung ataupun yang tidak, contohnya program yang didanai melalui dana desa atau kelurahan untuk kepentingan bersama. Meskipun demikian program-program yang sudah diupayakan penyusunan oleh Bappeda Kebumen belum berhasil menyelesaikan masalah kemiskinan.

Meski demikian, upaya pemerintah Kabupaten Kebumen harus tetap dilanjutkan. Bentuk-Bentuk Kemiskinan di Kabupaten Kebumen: Kemiskinan dapat disebabkan oleh sebab-sebab

struktural dan sebab-sebab lainnya. Menurut Selo Soemardjan dalam kutipan detikcom, kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang dialami sekelompok orang karena struktur sosial yang menghalangi mereka untuk memanfaatkan sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia. Di Kabupaten Kebumen yang mayoritas daerahnya persawahan dan mayoritas pekerjaannya adalah petani, akan tetapi semakin berkembangnya zaman, generasi muda banyak yang tidak mau mengelola persawahan dan memilih untuk merantau dan akhirnya terdapat orang yang sudah tua yang tenaganya sudah tidak besar lagi untuk mengelola sawah. Dan pada akhirnya susah mencari orang yang dapat mengelola sawah. Namun kita bisa melihat bahwa upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan Pemprov Kebumen sangat baik, dengan beberapa program yang baik seperti penyediaan toilet, air bersih, listrik gratis, bantuan sosial BLT, PKH, dll.

Salah satu strategi untuk menangani tantangan yang muncul akibat pengaruh globalisasi di bidang pendidikan adalah dengan memperkuat peran mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). PKn, sebagai bagian dari kurikulum formal, tidak dapat menghindari dari arus global karena fokusnya yang menjangkau kehidupan sehari-hari warga negara (Wibowo & Wahono, 2017). PPKn memiliki peran penting dalam mempersiapkan kewarganegaraan yang bersifat global. Oleh karena itu, keberadaan mata pelajaran PKn di sistem pendidikan Indonesia harus mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman. Ini berarti bahwa kompetensi akademik dalam kurikulum PPKn harus diperkaya dengan pendidikan kewarganegaraan yang mengarah ke arah globalisasi. PPKn mampu memberikan bekal kepada peserta didik tentang pemahaman isu-isu global, ragam budaya di dunia, serta sistem dan lembaga internasional (Murdiono, Suharno, Wuryanani, 2020). Satu dari banyaknya problematik kancah global sebagai pusat isu kemiskinan, yang telah dijelaskan sebelumnya terkait dengan Kabupaten Kebumen, salah satu wilayah di Jawa Tengah.

Kemiskinan menjadi salah satu tantangan utama bagi BAPPEDA dalam upaya pembangunan. Mayoritas individu yang terjerat dalam kemiskinan seringkali memiliki keterbatasan akses terhadap teknologi, pendidikan, layanan kesehatan, dan sumber daya lain yang penting guna meraih kondisi ekonomi yang senantiasa bertumbuh dengan menitikberatkan aspek yang inklusif sekaligus berkelanjutan. Dampak negatif kemiskinan juga dapat menghambat kemajuan suatu negara dan menghambat usaha untuk perbaikan. Dalam konteks pelaksanaan pembangunan nasional, peningkatan kualitas SDM menjadi kunci penting. Setiap individu perlu memiliki kemampuan untuk bersaing dan berinovasi agar dapat berkontribusi pada percepatan pembangunan nasional. Oleh karena itu, dalam upaya membangun negara yang maju, BAPPEDA harus diperkuat untuk melawan kemiskinan. Pengentasan kemiskinan harus menjadi prioritas utama dalam membangun ekonomi yang kuat dan berkelanjutan.

Metode

Penelitian ini ialah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tempat penelitian di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dengan waktu penelitian dari Bulan Februari-Maret 2024. Penentuan subjek penelitian ditentukan secara *purposive*. Adapun subjek penelitian ini berjumlah (2) orang yaitu, SubKoor Bidang Pemerintahan dan pembangunan Manusia, dan salah satu masyarakat di lingkungan Kabupaten Kebumen. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan *cross check* Selanjutnya analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Dalam interpretasi kemiskinan, dua konsep utama muncul, yaitu kemiskinan makro dan kemiskinan mikro. Badan Pusat Statistik (BPS) merumuskan kemiskinan sebagai kemiskinan makro, yang mencerminkan kondisi di mana pendapatan per individu dalam satu bulan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang ditandai dengan garis kemiskinan (GK). GK menandai

batas minimum pengeluaran per kapita per bulan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan esensial seperti makanan dan barang kebutuhan lainnya. Sementara itu, konsep kemiskinan mikro menafsirkan kemiskinan melalui data yang dikumpulkan melalui sensus yang melibatkan seluruh populasi, menawarkan pendekatan kuantitatif yang mendetail dan dapat digunakan untuk intervensi program atau kegiatan secara spesifik, berdasarkan nama dan alamat.

Di Kabupaten Kebumen, penanggulangan kemiskinan dikelola oleh sebuah lembaga bernama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Badan ini berperan penting sebagai mitra pemerintah daerah dalam upaya mengatasi kemiskinan. Terdapat 5 bidang di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Pertama terdapat bidang perencanaan, pengendalian dan Evaluasi, Kedua bidang ekonomi.

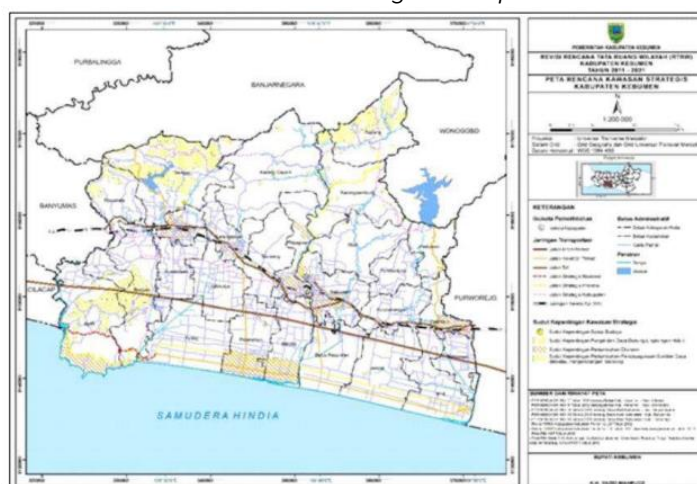
Upaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Kebumen dalam Persepektif Kebijakan

Kemiskinan, bersama dengan masalah pengangguran terbuka yang meluas dan kekurangan dalam kualitas SDM, termasuk mentalitas yang membebani pikiran masyarakat kurang mampu, tetap menjadi fokus penting dalam agenda pembangunan lokal. Berbagai inisiatif Pemerintah pusat dalam mengatasi kemiskinan, seperti Program Sembako, Program Keluarga Harapan, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Indonesia Pintar, menjadi bagian dari strategi penanggulangan. Di sisi lain, di Kabupaten Kebumen, program-program seperti bantuan sosial terpadu berbasis keluarga dan pemberdayaan masyarakat, serta inisiatif untuk memerangi kemiskinan melalui sektor agrobisnis, pendidikan, peningkatan daya saing UMKM, dan koperasi, telah terbukti cukup berhasil.

Strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kebumen, sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang telah mengalami revisi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2022, diterapkan dengan pendekatan yang terstruktur. Ini termasuk upaya untuk mereliefkan beban biaya yang ditanggung oleh masyarakat miskin, meningkatkan kapabilitas dan pendapatan mereka, serta menggalakkan pengembangan usaha mikro dan kecil yang berkelanjutan. Selain itu, program ini bertujuan untuk menyatukan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan serta melakukan perbaikan dalam pengelolaan data penduduk miskin.

Gambar 1

Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Kebumen



Sumber: Website Satu Peta BIG, Bappeda 2019

Kawasan Strategis adalah bagian wilayah Kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap kepentingan ekonomi, sosial, budaya,

dan/atau kelestarian lingkungan. Kawasan strategis di wilayah kabupaten meliputi: Kawasan Strategis Nasional di wilayah kabupaten meliputi: Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi. Kawasan Strategis Provinsi meliputi: Kawasan Perkotaan Gombong-Karanganyar-Kebumen dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; Kawasan Bentang Alam Karst dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; Kawasan Bentang Alam Karst dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi. Kawasan Strategis kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi:

- a. Kawasan ekonomi cepat tumbuh Prembun-Kutowinangun-Kebumen-Sruweng-Karanganyar-Gombong; yaitu kawasan perkotaan yang menjadi pusat pertumbuhan kawasan lainnya
- b. Kawasan pesisir Ayah; yaitu kawasan yang memiliki potensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di sektor perikanan dan pariwisata
- c. Kawasan Petanahan dan Kawasan Peruntukan Industri; yaitu kawasan yang memiliki potensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di sektor perindustrian, perdagangan dan jasa
- d. Kawasan Strategis Lahan Pangan Berkelanjutan di seluruh kecamatan; yaitu kawasan pertanian yang produktivitas padinya tinggi dan saluran irigasi teknisnya baik
- e. Kawasan perbatasan Rowokele dan Mirit; yaitu kawasan yang memiliki potensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di sektor pertanian/agrobisnis
- f. Kawasan industri genteng Pejagoan; yaitu kawasan pusat pertumbuhan ekonomi di sektor industri genteng
- g. Kawasan pelestarian sarang burung walet di Kecamatan Ayah dan Buayan: yaitu kawasan pusat pelestarian ekosistem burung laawet

Dari telaah kinerja penanggulangan kemiskinan, telaah peraturan, evaluasi kebijakan program, dan telaah lembaga yang telah dijalankan, ditemukan bahwa program penanggulangan kemiskinan pada periode 2021-2026 sebagai berikut:

- a. Program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu, yang berlandaskan pada keluarga, rumah tangga, atau individu, bertujuan untuk memenuhi hak dasar, mengurangi beban kehidupan, serta meningkatkan mutu kehidupan bagi masyarakat yang kurang mampu melalui:
 - 1) "Satu Data Untuk Semua" merupakan integrasi komprehensif antara data kependudukan dan data kesejahteraan sosial, yang menjadi dasar penentuan target program. Melalui Kartu Kebumen Sejahtera, upaya pengentasan kemiskinan dipastikan tepat sasaran dan efisien. Kartu tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat pengelolaan data, tetapi juga sebagai kontrol untuk memastikan bahwa program tersebut tepat sasaran.
 - 2) Pelayanan sosial bagi warga miskin bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan dasar mereka.
 - 3) Program peningkatan ketahanan pangan bertujuan untuk memastikan kecukupan pangan bagi warga miskin, sehingga mereka dapat mandiri dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan.
 - 4) Program Pelayanan Pendidikan bagi warga miskin difokuskan pada meningkatkan akses pendidikan, mengurangi angka putus sekolah, dan meningkatkan kualitas pendidikan. Ini diwujudkan melalui program unggulan seperti SIS SUSANA dan penguatan sekolah inklusi.

- 5) Pelayanan Kesehatan bagi warga miskin bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan penanganan penyakit kronis melalui program seperti BUMEN SEHATI dan SUBUSAH.
 - 6) Program Peningkatan Kesehatan Lingkungan dan Permukiman bagi warga miskin bertujuan untuk menyediakan rumah yang layak dan menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.
- b. Program pemberdayaan masyarakat serta penguatan pelaku usaha mikro dan kecil adalah upaya yang dirancang untuk bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan melalui
- 1) Program pemberdayaan ekonomi masyarakat kurang mampu adalah usaha yang diselenggarakan untuk menekan tingkat pengangguran dan memperbaiki pendapatan kaum miskin. Langkah-langkahnya diwujudkan dengan:
 - a) Peningkatan pendapatan petani dan nelayan yang kurang mampu merupakan fokus kegiatan yang diarahkan pada pemberdayaan mereka. Usaha ini akan diterapkan melalui inisiatif terkemuka daerah seperti Tani Mulyo, yang bertujuan memperbesar hasil panen pertanian dengan memperbaiki sarana dan prasarana pertanian, serta memperkaya potensi perikanan lokal baik di daratan maupun di lautan.
 - b) Pemberdayaan sektor usaha mikro dan kecil, pasar tenaga kerja, dan industri pariwisata bertujuan menekan angka pengangguran. Program-program andalan daerah seperti Kebumen Ekonomi Handal, yang didorong oleh Lawet Muda Kreatif dan dorongan wirausaha muda, KAPOK PAK EKO untuk merangsang pertumbuhan ekonomi di pedesaan, ANDALAN PAS untuk menopang modal bagi UMKM dan koperasi, KUMPUL BAKUL untuk mempromosikan dan mengembangkan jaringan pemasaran produk agrobisnis dan lokal, serta DEMEN MBUMEN yang mendorong cinta pada produk Kebumen serta pengembangan potensi pariwisata desa. Produk-produk terpilih seperti gula semut, Genjah ENTog, garam, Sapi PO, dan produk-produk hortikultura berharga tinggi seperti jambu kristal, belimbing madu, semangka, pepaya, dan pisang, menjadi katalisator dalam program ini.
 - c) Pembentukan unit layanan disabilitas di sektor ketenagakerjaan bertujuan memberikan dukungan bagi mereka dalam mendapatkan informasi dan meningkatkan keterampilan agar mampu bersaing dalam dunia kerja.
 - 2) Program-program lain yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menggalang aktivitas ekonomi dan kesejahteraan kaum miskin, termasuk program-program dengan dana desa atau kelurahan, melibatkan:
 - a) Penanggulangan Bencana: Berfokus pada peningkatan kesiapsiagaan, penanganan, dan pengurangan risiko bencana. Program MEN TAMBENG: Kebumen Tanggap Bencana adalah langkah utama dalam memperkuat kesadaran akan bencana serta pencegahan dan penanggulangan yang efektif.
 - b) Pembangunan Desa: Bertujuan meningkatkan inovasi dalam upaya penanggulangan kemiskinan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat di tingkat kecamatan dan desa. Program-program utamanya, seperti DESMELI (Desa Melek Internet) dan DEMEN MBUMEN (Gerakan Cinta Produk Kebumen dan Pengembangan Pariwisata Berbasis Potensi Desa), memajukan potensi lokal dan kegiatan ekonomi.

- c) Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil: Mendorong peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, terutama bagi kaum miskin. Program GO-LAK: Jemput ke Rumah Layanan Administrasi Kependudukan memberikan solusi efisien untuk mendukung pelayanan administrasi yang cepat dan tepat kepada mereka.
- d) Penguatan Kelembagaan dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan: Memusatkan upaya pada peningkatan kinerja dan optimalisasi lembaga penanggulangan kemiskinan di tingkat kabupaten.
- e) Infrastruktur Pendukung Penanggulangan Kemiskinan: Mendorong tersedianya infrastruktur pendukung bagi upaya penanggulangan kemiskinan. Program-program unggulan daerah seperti JAMU SEGER (Jalan Mulus Ekonomi Bergerak) dan BANYU MILI (Air Irigasi Tersedia Terus) bertujuan memberikan fondasi yang kuat bagi aktivitas ekonomi yang berkelanjutan.

Strategi penanggulangan kemiskinan yang dijalankan untuk lima tahun ke depan diselenggarakan dengan prinsip "Sinergitas Seluruh Pihak Terkait dan Peningkatan Keterlibatan Masyarakat Serta Pemanfaatan Sumber Daya Lokal yang Kaya". Pendekatan ini menggambarkan semangat kerjasama antara berbagai pihak dalam upaya mengatasi kemiskinan, dengan mengoptimalkan kearifan lokal sebagai basis utama.

Program Penanggulangan Kemiskinan merupakan rangkaian kegiatan yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor bisnis, dan komunitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui berbagai inisiatif, seperti bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, dukungan bagi usaha mikro dan kecil, serta program-program lain yang bertujuan meningkatkan aktivitas ekonomi. Secara garis besar, program penanggulangan kemiskinan dapat dibagi menjadi tiga bagian, yakni: a) program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu yang berbasis pada kebutuhan rumah tangga, keluarga, atau individu, guna memastikan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat miskin; b) program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan menguatkan kapasitas kelompok masyarakat miskin agar turut serta dan mendapatkan manfaat dari proses pembangunan; serta c) program-program lain yang secara langsung maupun tidak langsung dapat memajukan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program-program yang menggunakan dana desa atau kelurahan. Begitu pula di Kabupaten Kebumen yang mempunyai beberapa program untuk mengatasi permasalahan kemiskinan.

Program Unggulan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah kumpulan program yang diutamakan oleh para pemimpin daerah selama lima tahun kedepan. Program-program tersebut meliputi beragam inisiatif, seperti: Go-LAK, Satu Data Untuk Semua, Stip Korupsi Gratifikasi dan Pungli, Tiada Hari Tanpa Pelayanan (THTP), Festival Anggaran, Peningkatan Kapasitas SDM, Peningkatan Kesejahteraan Pegawai, SIS SUSANA, BASUH, SIRUP, Penguatan Sekolah Inklusi, BUMEN SEHATI, SIBUSAH, Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin, KEBUMEN EKONOMI HANDAL, DESMELI (DESa MELek Internet), KAPOK PAK EKO, ANDALAN PAS, KUMPUL BAKUL, TANI MULYO, DEMEN MBUMEN, JAMU SEGER, BANYU MILI, Nandur wit nggo Anak putu, TUPAT RUJI, MESIN SERBU, dan TAMBENG.

Di samping ragam program unggulan yang telah terpilih dalam kancah Kabupaten Kebumen, terdapat pun program perangkat daerah yang tak kalah berarti. Program ini, sebagai bagian penting dari kegiatan administratif, menjadi instrumen kunci dalam mencapai tujuan yang telah terukir dalam Rencana RPJMD. Pembentukan prioritas pembangunan daerah ditata secara cermat, menyoroti interkoneksi antara program-program perangkat daerah dalam meraih visi dan misi daerah serta pencapaian SPM, yang telah diharmonisasikan dengan arah kebijakan nasional dan provinsi, melibatkan kerja sama antar perangkat daerah. Penetapan program perangkat daerah

mempertimbangkan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Secara esensial, fokus dan prioritas dari tiap program adalah:

a. Pendidikan

Rencana utama yang akan dilaksanakan adalah pengelolaan pendidikan. Program yang telah dirancang untuk urusan pemerintahan Pendidikan difokuskan untuk membantu mencapai SPM di bidang pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan non-kesetaraan. Selain itu, program ini sejalan dengan pencapaian visi dan misi daerah, terutama dalam misi kedua yang menekankan peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Dengan tekad yang kuat, misi ini akan diwujudkan melalui beberapa program unggulan, seperti SIS SUSANA (Program beasiswa dan subsidi bagi warga miskin dan anak yatim), SIRUP (Program intensif untuk guru PAUD, TK, SD, dan SMP), serta penguatan sistem sekolah inklusi.

b. Kesehatan

Rencana utama yang akan dilaksanakan dalam bidang pemerintahan kesehatan adalah untuk mendukung pencapaian SPM kesehatan. Selain itu, program ini sejalan dengan pencapaian visi dan misi daerah, terutama dalam misi kedua yang menekankan peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, serta layanan rujukan. Pelaksanaan misi ini akan melibatkan 37 Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD), yang terdiri dari 35 puskesmas, 2 rumah sakit, dan Unit Pelayanan Terpadu Dinas Kesehatan. Pencapaian misi tersebut akan diperjuangkan melalui beberapa program unggulan, antara lain BUMEN SEHATI (program Peningkatan Derajat Kesehatan Bagi Warga Miskin), SIBUSAH (Program Santri Kebumen Sehat dan Berkah), serta Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin.

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana utama yang akan dijalankan dalam ranah pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang adalah untuk mendukung pencapaian SPM di sektor pekerjaan umum dan penataan ruang, terutama di sub-bidang air minum. Program ini sejalan dengan pencapaian visi dan misi daerah, khususnya misi keempat yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pencapaian misi tersebut akan diupayakan melalui beberapa program unggulan, seperti JAMU SEGER (Jalan Mulus Ekonomi Begerak) dan BANYU MILI (Air Irigasi Tersedia Terus).

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rancangan utama yang akan diwujudkan dalam urusan pemerintahan mengenai Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, adalah untuk memberdayakan pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, khususnya dalam sektor pengelolaan air limbah dan perumahan rakyat. Melalui program ini, kita tidak hanya mengejar target yang ditetapkan, tetapi juga mengikuti jejak visi misi daerah, terutama dalam misi keempatnya, yakni meningkatkan mutu dan jumlah infrastruktur secara berkelanjutan serta memperhatikan aspek lingkungan.

e. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Rencana program utama yang akan dijalankan dalam tata kelola pemerintahan terkait ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat bertujuan untuk mendukung pencapaian SPM di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta SPM Pemadam Kebakaran dan SPM Penanggulangan Bencana. Program ini tidak hanya mengamati target-target yang telah ditetapkan, tetapi juga sejalan dengan visi misi daerah,

terutama dalam misi kelima, yakni menciptakan masyarakat yang damai, beradab, dan berkebangsaan.

f. Sosial

Rancangan program utama yang akan dikerjakan dalam aspek pemerintahan sosial bertujuan untuk mendukung pencapaian SPM di bidang sosial. Program ini sejalan dengan visi misi daerah, terutama dalam misi kedua, yakni meningkatkan aksesibilitas dan mutu layanan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok lainnya. Untuk mencapai misi tersebut, fokus program akan difokuskan pada integrasi data penduduk dengan semua sektor yang berkaitan dengan kesejahteraan, dalam upaya mewujudkan program unggulan "Satu Data Untuk Semua".

g. Tenaga Kerja

Rancangan program utama yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan berkaitan dengan tenaga kerja adalah untuk mendukung terwujudnya visi misi daerah, terutama misi ketiga, yang menggariskan peningkatan daya saing ekonomi melalui pemanfaatan potensi sumber daya alam, pariwisata, dan warisan lokal, dengan basis utama pada sektor agrobisnis. Dalam menggapai misi tersebut, fokus program akan diberikan pada inisiatif unggulan, seperti "Kebumen Ekonomi Handal" melalui Program Lawet Muda Kreatif. Program ini dipandang sebagai wahana bagi generasi muda Kebumen dalam mengembangkan bakat dan keahlian, dengan tujuan menekan tingkat pengangguran.

h. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan yang menyangkut Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dirancang sejalan dengan visi misi daerah, terutama dalam misi kedua, yang mengutamakan peningkatan aksesibilitas dan mutu layanan pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan dasar lainnya.

i. Pangan

Rancangan program utama yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan yang berkaitan dengan tenaga kerja telah disusun untuk mendukung pencapaian visi misi daerah, khususnya misi ketiga, yakni mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata, dan kearifan lokal yang bertumpu pada sektor agrobisnis.

j. Pertanahan

Rencana program utama yang akan diimplementasikan dalam ranah pemerintahan yang mengatur pertanahan adalah menyelesaikan sengketa lahan. Program ini diinisiasi dengan tujuan mendukung pencapaian indikator kinerja dalam bentuk persentase penyelesaian sengketa lahan.

k. Lingkungan Hidup

Rancangan program utama yang akan dikerjakan dalam tata kelola pemerintahan mengenai Lingkungan Hidup bertujuan untuk mendukung pencapaian SPM di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, terutama dalam pengelolaan air limbah. Program ini sejalan dengan visi dan misi daerah, terutama dalam upaya meningkatkan mutu dan jumlah infrastruktur secara berkelanjutan dan memperhatikan aspek lingkungan. Untuk mencapai misi tersebut, program unggulan yang dijalankan adalah Nandur Wit Nggo Anak Putu.

l. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rancangan program utama yang akan dilaksanakan dalam tata kelola pemerintahan terkait Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil diharapkan dapat menyokong pencapaian visi misi daerah, terutama dalam misi pertama, yakni meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dengan memberikan pelayanan birokrasi yang responsif, serta menerapkan E-Gov dan Open-Gov yang terintegrasi. Upaya mencapai misi tersebut akan dipacu melalui program unggulan,

seperti GO-LAK (Jemput ke rumah layanan administrasi kependudukan) dan Satu Data Untuk Semua (Integrasi data kependudukan dengan semua sektor terkait urusan kesejahteraan).

m. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rencana program utama yang akan diimplementasikan dalam pemerintahan terkait Pemberdayaan Masyarakat dan Desa direncanakan untuk mendukung pencapaian visi misi daerah, terutama misi pertama, yang menekankan peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dengan menyediakan layanan birokrasi yang responsif, serta menerapkan E-Gov dan Open-Gov yang terintegrasi.

n. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dalam rangka mencapai visi misi daerah, khususnya dalam misi peningkatan Tata Kelola Pemerintahan melalui pelayanan birokrasi yang responsif dan menerapkan E-Gov dan Open-Gov yang terintegrasi, telah diusulkan rencana program prioritas yang akan dikerjakan dalam urusan pemerintahan terkait Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Ini merupakan langkah strategis untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut dengan menyusun program prioritas yang tepat dan efektif.

Kabupaten Kebumen sedang menghadapi tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam aspek kinerja tata kelola yang masih belum optimal. Beberapa faktor yang menyebabkan hal ini antara lain rendahnya akuntabilitas kinerja pemerintah, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang masih belum optimal, serta penerapan e-government yang belum mencapai titik optimal. Selain itu, kualitas pelayanan publik dan stabilitas keamanan serta ketertiban umum juga belum sepenuhnya terjaga dengan baik.

Misi pertama Kabupaten Kebumen untuk periode 2021-2026 adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui pelayanan birokrasi yang responsif dan penerapan e-government dan open government yang terintegrasi. Untuk mencapai visi dan misi daerah terkait dengan tata kelola pemerintahan ini, diperlukan rencana aksi reformasi birokrasi yang komprehensif, yang mencakup pencapaian birokrasi yang bersih, akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan publik yang optimal, serta optimalisasi penerapan open government. Berikut adalah strategi untuk mewujudkan reformasi birokrasi di Kabupaten Kebumen:

1. Strategi Penyempurnaan Struktur dan Prosedur Birokrasi:

Langkah utama yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen adalah meningkatkan struktur dan prosedur birokrasi. Hal ini dilakukan dengan menggunakan kekuasaan untuk menerapkan aturan baru terhadap sistem pemerintahan, dengan maksud untuk merubah tujuan, struktur, dan standar prosedur yang sudah ada, agar mempermudah pencapaian tujuan pembangunan daerah. Penataan ulang birokrasi atau restrukturisasi organisasi pemerintahan menjadi penting dan sangat diperlukan dalam upaya mencapai visi dan misi daerah untuk periode 2021-2026. Pembenahan struktur birokrasi bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi menuju struktur yang berorientasi pada hasil yang diukur dari keluaran (output) serta hasil (outcome), didukung dengan perbaikan tata laksana organisasi. Selain itu, pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja dengan penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan evaluasi pembangunan secara terpadu, termasuk pengawasannya.

2. Strategi Peningkatan Sistem dan Manajemen Sumber Daya Aparatur:

Langkah kedua dalam mewujudkan reformasi birokrasi adalah memperbaiki sistem dan manajemen sumber daya aparatur serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aparatur. Hal

ini dilakukan untuk menciptakan birokrasi yang mampu, profesional, memiliki integritas, responsif, dan inovatif menuju pemerintahan yang berskala internasional.

3. Strategi Peningkatan Pelayanan Publik:

Strategi ini bertujuan untuk menciptakan pelayanan publik yang unggul. Hal ini dilakukan melalui integrasi layanan perizinan dalam satu loket di Mal Pelayanan Publik, dengan tujuan menciptakan pelayanan yang mudah, murah, dan cepat. Selain itu, pelayanan didukung dengan peningkatan e-government yang terintegrasi dan open government untuk memastikan pelayanan yang cepat, mudah, dan akuntabel.

Ketiga sasaran yang disebutkan di atas merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Langkah-langkah yang akan diambil melalui program-program unggulan daerah selama periode 2021-2026 meliputi beragam inisiatif seperti Go-Lak, Satu Data untuk Semua, Stop Korupsi, Gratifikasi, dan Pungli, serta implementasi konsep Tiada Hari Tanpa Pelayanan (THTP). Festival Anggaran juga akan diadakan sebagai upaya untuk memperkuat transparansi informasi publik, sementara peningkatan kapasitas SDM aparatur pemerintahan dan peningkatan kesejahteraan pegawai juga menjadi prioritas.

Tantangan yang dihadapi ke depan adalah penerapan e-governance yang terintegratif untuk meningkatkan kinerja tata kelola pemerintahan. Berbagai aplikasi e-government yang sudah diterapkan seperti e-planning, e-budgeting, system delivery, penatausahaan, e-controlling, e-reporting, e-monev serta aplikasi lainnya, meskipun belum sepenuhnya terintegrasi, memiliki potensi untuk mewujudkan smart governance. Paradigma orientasi dalam tata kelola pemerintahan telah bergeser dari konsep network government menjadi collaborative governance. Pemerintah tidak lagi dapat bertindak sendiri dalam menyelesaikan masalah-masalah publik. Oleh karena itu, reformasi birokrasi di Kabupaten Kebumen bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, serta memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kendala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Kebumen dalam Perspektif Kebijakan

Program maupun kebijakan suatu daerah untuk menyelesaikan permasalahan pastinya terdapat kendala atau hambatan yang terjadi. Begitu pula program yang dibentuk oleh Bappeda Kabupaten Kebumen dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kebumen. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Bappeda dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kebumen. Berikut kendala yang dihadapi oleh Bappeda Kabupaten Kebumen dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kebumen.

a. Data antara Pemerintah Pusat dengan Kenyataan di lapangan tidak sama

Untuk mengkategorikan masyarakat yang termasuk miskin atau tidak miskin, pemerintahan Kabupaten Kebumen mendata masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Kebumen. Hal tersebut menjadi suatu kendala di Kabupaten Kebumen karena data antara pemerintah pusat dengan kenyataan di lapangan tidak sama. Ada beberapa faktor yang menjadi hal tersebut bisa terjadi, diantaranya: terdapat metode yang berbeda dalam mendata masyarakat miskin, seperti Badan Pusat Statistik menggunakan pendekatan survey dalam penentuan jumlah penduduk sedangkan pada kenyataannya banyak masyarakat yang tidak terdata dalam data tersebut. Akan tetapi semakin tahun data yang ada di Pemerintah Pusat dengan kenyataannya semakin baik dan tidak ada kekeliruan dalam mengkategorikan masyarakat miskin.

b. Program Tidak Tepat Sasaran

Data menjadi suatu sekumpulan informasi dan keterangan yang didapatkan melalui pengamatan, pencarian sumber-sumber tertentu. Dengan data yang valid untuk memudahkan sebagai acuan kegiatan. Program-program yang seharusnya dapat membantu dalam permasalahan kemiskinan, tetapi dalam kenyataannya hal tersebut tidak sesuai apa yang diharapkan. Banyak di lapangan yang tidak sesuai dengan kehidupan masyarakatnya. Banyak masyarakat yang merasa bahwa keadaannya dibawah rata-rata perekonomian tetapi tidak mendapatkan hak seperti bantuan dari pemerintah yang didapat, tetapi terdapat juga masyarakat yang sebetulnya mampu tetapi masih mendapatkan yang bukan haknya. Hal tersebut dinamakan data yang tidak tepat sasaran.

Sekarang ini banyak permasalahan data tidak tepat sasaran karena sesuai dengan kendala pertama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kebumen yaitu, data pemerintah pusat tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Hal tersebut menjadi dampak dari data yang tidak tepat sasaran ini. Akan tetapi untuk akhir-akhir ini data yang sudah ada sudah banyak yang tepat sasaran dan kemiskinan di Kabupaten Kebumen menurun.

Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dijabarkan, dapat disimpulkan bahwa Bappeda Kabupaten Kebumen telah menginisiasi serangkaian langkah untuk mengatasi masalah kemiskinan dalam perspektif kebijakan yang dilaksanakan melalui program-program. Beberapa program telah dirancang guna menurunkan tingkat kemiskinan di daerah tersebut, seperti SIS SUSANA, BASUH, BUMEN SEHATI, Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin, KEBUMEN EKONOMI HANDAL, KAPOK PAK EKO, dan lain-lain. Program-program ini telah dimasukkan ke dalam RPJM dan menjadi prioritas di Kabupaten Kebumen.

Untuk keseluruhan program yang sudah dilaksanakan dengan baik dan terdapat hasil yang bisa mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Kebumen. Sedangkan untuk kendala yang dihadapi oleh Bappeda dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kebumen, terdapat 2 (dua) kendala yaitu (1) data pemerintah pusat yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan dan, (2) program yang tidak tepat sasaran. Untuk kedua kendala tersebut pada saat ini sudah teratasi dan bisa berjalan dengan lancar.

Referensi

- Akhmad, K.A. (2021). Peran Pendidikan Kewirausahaan Untuk Mengatasi kemiskinan dalam *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*. Vol.2, No. 06, hal 173-181.
- Alam, A. S. (2012). Analisis kebijakan publik kebijakan sosial di perkotaan sebagai sebuah kajian implementatif. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 1(3), 78-92.
- Al Ma'shum, N.H.H, & Soemitra, A. (2022). Analisis Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Utara (Bappeda Su) Terhadap Pembangunan Daerah Di Wilayah Sumatera Utara dalam *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)*. Vol.2, No.2, hal 3396-3400.
- Anastasya, Kerin. 2023. Tingginya Tingkat Kemiskinan Menjadi faktor Penghambat dalam Proses Pembangunan Nasional. <https://www.umm.ac.id/id/arsip-koran/lima-detik/tingginya-tingkat-kemiskinan-menjadi-faktor-penghambat-dalam-proses-pembangunan-nasional.html#:~:text=Karena%20mayoritas%20masyarakat%20yang%20hidup,ekonomi%20yang%20kuat%20dan%20berkelanjutan>

- Arfiansyah, Mufti Arief. (2020). Dampak Dana Desa Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Tengah dalam *jurnal Studi Islam dan Sosial*. Vol 01, Nomor 01, Hal 91-106.
- Arifin, Johan. (2020). Budaya Kemiskinan dalam Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia Culture of Poverty in Poverty Reduction in Indonesia. Vol.06, No. 02, hal 114-132.
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Assyakurrohim, dkk. (2023). Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif dalam *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer*. Vol 3, No 1, hal 1-9.
- Astari, Dewi. (2021). Analisis Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Utara (Bappeda Su) Terhadap Pembangunan Daerah Di Wilayah Sumatera Utara. (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Arintoko, dkk. (2020). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan (Studi Kasus di Kabupaten Banjarnegara, Cilacap, Purbalingga, Kebumen, dan Banyumas) dalam *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 451-455.
- Bupati Kebumen. (2021). *Peraturan Bupati Kebumen Nomor 127 Tahun 2021*, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- Bupati Kebumen. (2022). *PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 2 TAHUN 2022*, TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 20 TAHUN 2012 TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN.
- B, F. Z. (2020). Pembebasan Jerat Feminisasi kemiskinan dalam *jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya*. Vol 2, No 1, hal 9-16.
- Desinta, Dinda dan Jeffry R. H. Sitorus. (2021). Pengaruh Kejadian Bencana Alam dan Sosial Demografi Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2017-2020 (The Impact Of Natural Disasters And Socio Demographic On Poverty In Central Java 2017-2020). Hal 383-392.
- Desrinelti, dkk. (2021). Kebijakan publik: konsep pelaksanaan dalam *jurnal riset tindakan Indonesia*. Vol.6, No1, hal 83-88.
- Detikcom. (2023, Mei 15). 15 Daerah Termiskin di Indonesia, di Mana Saja?. <https://www.detik.com/sumbagsel/bisnis/d-6720837/15-daerah-termiskin-di-indonesia-di-mana-saja>
- Dian. (2022, Mei 31). Angka Kemiskinan Eksrem di Kebumen Turun 0,7 Persen, Terbesar di Jateng. https://www.kebumenkab.go.id/index.php/web/news_detail/2/6856
- Fajri, K.S. (2021). Analisis Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Utara (Bappeda Su) Terhadap Pembangunan Daerah Di Wilayah Sumatera Utara. (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta).
- Fiantika, dkk. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI. Kota Padang Sumatera Barat.
- Fitriani, Ika. (2017). *COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN (STUDI KASUS COLLABORATIVE GOVERNANCE PADA TIM KOORDINASI PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN)*. (Tesis, Universitas Gadjah Mada).
- Guntur, Muhammad dkk. (2019). *Analisis Kebijakan Publik*. Universitas Negeri Makassar. Makassar.

- Jalunggono, gentur, dkk. (2020). Pengaruh factor-faktor penyebab Kemiskinan di Kabupaten Kabumen Pada Tahun 2009-2018. Vol 2, No 1, hal 229-243.
- Kadji, Yulianto. 2012. Kemiskinan dan Konsep Teoritisnya.
- Kurniawan, Teguh, dan Didi Rasdi.(2019). Efektivitas Kemkitraan Pemerintah dan Swasta Dalam Ipay Penanggulangan Kemiskinan: Sebuah Tinjauan Literatur. Vol. 5, No.02, hal 97-112.
- Moleong, Lexy J. 2013. Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Murdiono, M., Suharno, & Wuryandani, W. (2020). Global Citizenship Values in the Student's Book of Pancasila and Civic Education. *Advance in Social Science, Education and Humanities Research*, 401(1), 169-175
- Murdiyana, dan Mulyana. 2017. Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia dalam *Jurnal Politik Pemerintahan*. Vol 10, No 1, hal 74-96. Institut Pemerintah Dalam Negeri.
- Mustakim, Azrul. (2021). Strategi penanganan Kemiskinan Masyarakat di Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.(Skripsi Sarjana, Universitas Islam Riau)
- Mutiasari, M., Yamin, M. N., & Alam, S. (2016). Implementasi Kebijakan Perizinan Dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat Pada Kepolisian Resort (Polres) Kota Kendari. *Publica: Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 7(1), 1-10.
- Papilaya, josef. (2020). Kebijakan Publik dalam Pengentasan Kemiskinan (Suatu kajian peranan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan *dalam jurnal Bimbingan dan Konseling Terapan*. Vol 02, Nomor 01, Hal 77-91.
- Peraturan Bupati Bangka Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A Kabupaten Bangka. <https://bappeda.bangka.go.id/content/tugas-pokok-dan-fungsi#:~:text=Bappeda%20mempunyai%20tugas%20melaksanakan%20penyusunan,menyele%20nggarakan%20tugas%20penelitian%20dan%20pengembangan>
- Presiden Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Tahun 2014*, tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Nomor 166.
- Putri, Aulia Mutiara Hatia.(2023, Agustus 15). 10 Provinsi termiskin Didominasi wilayah Timur, Papua Nomor 1. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230815120846-128-463069/10-provinsi-termiskin-didominasi-wilayah-timur-papua-nomor-1>
- Pratama, D.E. (2017). UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI SEKTOR PARIWISATA. (Skripsi Sarjana, Universitas Negeri Yogyakarta).
- Safira, M. E. (2018). Pembuatan Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 dalam sistem pembuatan perundangan-undangan menurut Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Sangadah, Siti Khalimatus. 2020. PENGARUH INFLASI, PENERIMA BANTUAN SOSIAL RASTRA (Beras Sejahtera), DAN RATA-RATA PENGELUARAN PERKAPITA TERHADAP KEMISKINAN DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2009-2018. Universitas Tidar. Magelang.
- Sobirin, Uddin B. Sore. (2017). Kebijakan Publik. Makassar. CV SAH MEDIA.
- Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung : Alfabeta
- Sugiyono (2015). Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Bandung: Alfabeta.

- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- Sudjana. 2005. Metode Statistika. Bandung: Tarsito.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & B. ALFABETA .Bandung.
- Suharno. (2013). Dasar-Dasar Kebijakan Publik:Kajian Proses dan Analisis Kebijakan. Yogyakarta Ombak.
- Susilowati, T., & Saputra, A.P. (2021). PERANAN UNIT LOST AND FOUND DALAM PENANGANAN BAGASI YANG BERMASALAH PADA MASKAPAI CITILINK INDONESIA DI BANDARA HALIM PERDANAKUSUMA.
- Syawie, M. (2011). Kemiskinan dan Kesenjangan, Jurnal Informasi Kementerian Sosial. Vol. 16 No. 03 Tahun 2011.
- Widodo, Arif. (2021). Strategi Komunikasi Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan Daerah. Vol 1, No 1, hal 83-96.
- Wijaya, dkk. (2018) Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance).Semarang. Pustaka Magister.
- Zellatifanny, dkk. (2018). TIPE PENELITIAN DESKRIPSI DALAM ILMU KOMUNIKASI THE TYPE OF DESCRIPTIVE RESEARCH IN COMMUNICATION *STUDY dalam Jurnal Diakom*. Vol. 01, No. 02, hal 83-90.